

Implementasi Kebijakan Pengurangan Angka Stunting di Kabupaten Sukabumi

Kurniawati

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
nia719402@gmail.com

Keywords:
 Implementation
 Policy Stunting
 Sukabumi Regency

Abstract: *One of the significant health problems that has a direct impact on the quality of human resources is stunting. Sukabumi Regency is one of the regencies that still faces the problem of stunting. With a high level of stunting, the government must immediately address the problem of stunting because it has an impact on the quality of Indonesian human resources in the future. The Sukabumi Regency Health Office is part of the regional apparatus that handles health and is responsible for implementing stunting management policies. The Sukabumi Regency Government is committed to reducing these figures by implementing various policies and programs. This study aims to determine how the implementation of the stunting reduction policy in Sukabumi Regency is based on factors that influence policy implementation according to Edward III. This study uses a descriptive qualitative approach, with observation, interviews, and documentation as data processing techniques. To select informants, the researcher used a purposive sampling technique to select stakeholders who were considered to have knowledge about the problem.*

Kata Kunci:
 Implementasi,
 Kebijakan, Stunting,
 Kabupaten
 Sukabumi

Abstrak: Salah satu masalah kesehatan yang signifikan dan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia adalah stunting. Kabupaten Sukabumi adalah salah satu Kabupaten yang masih menghadapi masalah stunting. Dengan tingkat stunting yang tinggi, pemerintah harus segera menangani masalah stunting karena berdampak pada kualitas SDM Indonesia di masa depan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi adalah bagian dari perangkat daerah yang membidangi kesehatan dan bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan penanganan stunting. Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk menurunkan angka tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan dan program. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengurangan angka stunting di Kabupaten Sukabumi berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengolahan datanya. Untuk memilih informan, Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih stakeholder yang dianggap memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut

Pendahuluan

Salah satu masalah gizi yang dihadapi balita di Indonesia saat ini adalah stunting, juga dikenal sebagai balita pendek. Di mana balita mengalami kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang, yang menyebabkan balita terlalu pendek untuk usianya atau lebih tinggi dari rata-rata. Stunting umumnya disebabkan oleh infeksi berulang dan asupan gizi yang buruk. Kedua penyebab tersebut dipengaruhi oleh perawatan yang buruk dari dalam kandungan hingga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). (Kementerian PPN/Bappenas, 2018). Stunting menyebabkan anak menjadi lebih pendek secara fisik dibandingkan teman sebaya mereka. Ini juga berdampak pada perkembangan otak anak, yang menyebabkan kurangnya kemampuan motorik, kognitif, dan produktivitas di masa depan.

Kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi, yang dapat memperburuk gizi anak-anak, adalah salah satu dari banyak faktor yang dapat memperburuk stunting menurut WHO dan UNICEF (2019). Penyakit diare dan infeksi saluran pencernaan meningkat karena sanitasi yang buruk, yang mengurangi kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi dan meningkatkan risiko stunting. Oleh karena itu, mengatasi stunting memerlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan gizi, kesehatan, dan sanitasi. Selain itu, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting. HPK terdiri dari 270 hari selama kehamilan dan 730 hari kehidupan pertama bayi yang dilahirkan. Pada periode tersebut merupakan periode sensitif karena akibat yang ditimbulkan dalam masa ini akan bersifat permanen pada bayi dan tidak bisa di tolerir atau diperbaiki lagi. Intervensi khusus bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan penekanan pada ibu hamil dan bayi dalam rentang usia 0-6 bulan hingga 7-23 bulan, atau sejak masih dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Balita pada usia 12 hingga 24 bulan sering mengalami penyakit karena infeksi atau masalah status gizi karena mereka melewati peralihan dari bayi ke anak. (Tsaratifah, 2020).

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten dengan prevalensi stunting yang terus meningkat di Provinsi Jawa Barat. Dapat dilihat pada data persentase balita stunting Kabupaten Sukabumi dari 5 tahun terakhir yaitu tahun 2020 sampai 2024.

Tabel 1. Data Persentase Balita Stunting Kab. Sukabumi

Provinsi	Kabupaten	Persentase Balita Stunting	Tahun
Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	6.89%	2020
Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	7.33%	2021
Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	5.39%	2022
Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	7.48%	2023
Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	8,98%	2024

Sumber: <https://opendata.jabarprov.go.id>

Untuk mengatasi stunting Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggunakan Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota dan kebijakan lain, seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2016- 2021, dan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019- 2021. Pemerintah kemudian membuat kebijakan untuk mengurangi tingkat stunting dalam kaitannya dengan penanggulangan stunting. Menurut Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota, yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, penyebab langsung stunting, seperti rendahnya asupan gizi dan status kesehatan, diatasi melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Meskipun intervensi gizi sensitif bertujuan untuk mengatasi faktor tidak langsung yang berkontribusi pada ketahanan pangan, terutama akses terhadap makanan bergizi, lingkungan sosial terkait praktik pemberian makanan

bayi dan pengasuhan anak, akses terhadap layanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan. Intervensi gizi sensitif menyumbang 70% dari intervensi stunting, dibandingkan dengan intervensi gizi spesifik. Intervensi ini dilakukan melalui berbagai program pembangunan dan berfokus pada masyarakat secara keseluruhan. Karena mencakup berbagai sektor, bukan hanya sektor kesehatan, program tersebut dilakukan oleh berbagai lembaga atau kementerian.

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi, dengan sekitar 30,8% balita mengalaminya. Tujuan pemerintah adalah untuk mengurangi stunting secara signifikan dalam 10 tahun terakhir, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah mengambil tindakan pada banyak hal, termasuk gizi anak, kondisi rumah, ketersediaan air, dan pendampingan calon pengantin. Angka stunting masih jauh dari target pemerintah, meskipun ada penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, penurunan 7,5 persen dari 21,5% pada tahun 2023 diperlukan untuk mencapai target 14% (Setneg RI, 2024). Dengan target penurunan prevalensi stunting tersebut, Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu lokasi fokus intervensi pencegahan stunting terintegrasi tahun 2025 dengan skema pencegahan khusus berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2024). Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi perlu memiliki komitmen yang kuat terhadap penurunan prevalensi stunting terutama dalam menghadapi tahun 2025 saat ini.

Untuk mencapai target penurunan stunting yang signifikan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menerapkan berbagai kebijakan dan program. Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk mengatasi stunting, tetapi kurangnya pemahaman masyarakat masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan penurunan angka stunting. Seringkali dianggap hanya sebagai masalah gizi buruk, stunting juga dipengaruhi oleh hal-hal lain, seperti pola makan yang tidak seimbang, kurangnya akses ke layanan kesehatan, dan sanitasi yang buruk. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan tentang pelaksanaan kebijakan pengurangan angka stunting di Kabupaten Sukabumi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

baik tentang bagaimana program dan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan lebih baik, serta untuk memberikan saran tentang cara yang lebih baik untuk melaksanakannya.

Tinjauan Literatur

Penelitian ini membahas teori tentang implementasi dan kebijakan publik sebagai bagian penting dari siklus kebijakan. Salah satu komponen penting dalam kehidupan bernegara adalah kebijakan publik, yang memiliki peran penting dalam menentukan arah kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik adalah hasil dari proses politik dan mencerminkan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara untuk menangani masalah publik. Untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang proses pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik, berbagai teori dan metodologi telah dikembangkan.

Edward III (1980) berfokus pada teori implementasi kebijakan, yang menekankan bahwa kebijakan tidak akan berhasil hanya karena baiknya perumusan kebijakan tersebut. Implementasi yang efektif memerlukan koordinasi lembaga, komunikasi yang jelas, dan pengelolaan sumber daya yang baik. Metode ini menawarkan pemahaman baru tentang alasan implementasi kebijakan yang buruk sering terjadi karena ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dan perumusan kebijakan. Selain itu, Edward III menemukan bahwa pembuat kebijakan, birokrasi, dan masyarakat adalah aktor penting dalam implementasi kebijakan. Setiap pemain memiliki tanggung jawab untuk mengubah kebijakan saat ini menjadi kenyataan. Pembuat kebijakan harus memastikan bahwa kebijakan dapat diterjemahkan dan diterima oleh birokrasi. Kebijakan dapat gagal jika aktor-aktor ini tidak berkomunikasi dengan baik. Koordinasi yang jelas antara lembaga dan kepemimpinan adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Edward III, berbagai lembaga pemerintah harus bekerja sama dengan baik saat menjalankan kebijakan publik. Jika tidak ada kerja sama yang baik, kebijakan dapat tumpang tindih atau bahkan bertentangan satu sama lain. Edward III menyatakan bahwa banyak variabel yang saling terkait memengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan publik. Dalam teorinya, ia menentukan empat komponen utama yang sangat

penting untuk implementasi kebijakan: Komunikasi (communications), sumber daya (resources), disposisi (dispositions), dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada komunikasi. Pembuat keputusan harus tahu apa yang mereka lakukan agar implementasi efektif dapat terjadi. Setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus disampaikan (atau diberitahukan) kepada bagian personalia yang tepat agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Kesuksesan kebijakan juga bergantung pada komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Edward III berpendapat bahwa komunikasi yang jelas dan terbuka antara pembuat kebijakan (politik), pelaksana kebijakan (birokrasi), dan penerima kebijakan (masyarakat atau sektor terkait) akan mengurangi kesalahpahaman dan interpretasi yang dapat menghambat implementasi.

Sumber Daya

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah ketersediaan sumber daya keuangan, tenaga kerja, material, dan infrastruktur yang memadai. Edward III berpendapat bahwa kebijakan yang baik pun tidak akan berhasil tanpa sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaannya. Meskipun kebijakan itu sudah dirancang dengan baik, ia bisa gagal tanpa sumber daya yang cukup.

Disposisi

Kesuksesan kebijakan juga dipengaruhi oleh disposisi atau sikap pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Orang-orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan terutama birokrat dan pemangku kepentingan di lapangan dipengaruhi oleh motivasi, komitmen, dan arah mereka. Edward III mengatakan bahwa sikap yang positif dari orang-orang yang terlibat dapat membantu melaksanakan kebijakan, sementara sikap yang negatif, seperti menentang atau tidak peduli dengan kebijakan, dapat menghambatnya.

Struktur Birokrasi

Bagaimana kebijakan diterapkan dalam kehidupan nyata sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi suatu negara atau organisasi pemerintah. Edward III menyatakan

bahwa struktur birokrasi yang jelas dengan peran dan tugas yang jelas sangat membantu dalam implementasi kebijakan. Seberapa baik koordinasi antar instansi dalam menjalankan kebijakan yang sama dipengaruhi oleh struktur birokrasi. Dengan menekankan bahwa faktor-faktor ini harus dipertimbangkan dengan cermat agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, Edward III memberikan kontribusi penting dalam teori implementasi kebijakan. Perumusan kebijakan tidak hanya menentukan keberhasilannya; itu juga menentukan bagaimana kebijakan dikomunikasikan dan diterima oleh semua pihak yang terlibat, jumlah sumber daya yang tersedia, sikap dan komitmen aktor yang terlibat, dan struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, empat faktor ini harus diperhatikan dan dikelola dengan baik dalam praktik kebijakan publik untuk mencapai implementasi kebijakan yang sukses.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Moleong (2017) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam kehidupan manusia. Ini mencakup perilaku, makna, pengalaman, dan persepsi seseorang atau kelompok. Penelitian kualitatif berfokus pada mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena atau masalah serta mengeksplorasi makna dari perspektif atau pengalaman peserta. Peneliti mengumpulkan data dalam penelitian ini melalui interaksi langsung dengan peserta; metode ini bersifat induktif, yang berarti teori atau pemahaman lebih sering muncul setelah analisis data daripada di awal penelitian. Menurut Michael Q. Patton dalam bukunya *Qualitative Research & Evaluation Methods* (2002), teknik pengambilan sampel purposive digunakan ketika peneliti memilih individu atau kasus berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Patton menekankan bahwa metode ini berguna untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan kaya dari peserta yang memiliki pengalaman atau pers. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi sebagai informan pada penelitian ini yang dianggap memiliki pengalaman atau pandangan yang berkaitan dengan kebijakan stunting di Kabupaten Sukabumi.

Hasil Penelitian

Pada bagian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengurangan angka stunting menurut Edward III akan dibahas, dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di Kabupaten Sukabumi.

Komunikasi (communications)

Komunikasi yang berkaitan dengan cara berkomunikasi antar pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kota Sukabumi, yang tentunya sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam program ini dapat bekerja sama dengan baik dan efektif. Komunikasi yang baik akan membantu orang bertukar informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang lebih baik. Dalam melaksanakan kebijakan pengurangan angka stunting, pemerintah Kabupaten Sukabumi memanfaatkan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah seperti Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Sosial dan Pendidikan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tenaga Kesehatan, Kader Posyandu, dan masyarakat. Para pelaksana kebijakan dapat berkomunikasi dan bekerja sama baik di dalam maupun di luar organisasi mereka untuk menentukan ukuran dasar dan tujuan. Salah satu cara yang efektif untuk menerapkan kebijakan publik adalah koordinasi. Jika koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi lebih baik, kemungkinan kesalahan akan lebih rendah.

Komunikasi menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Pemerintah Kabupaten Sukabumi menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, seperti Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Sosial, lembaga pendidikan, LSM, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat. Koordinasi yang kuat ini diwujudkan melalui rapat koordinasi, pertemuan lintas sektor di tingkat kecamatan, dan pelatihan-pelatihan. Kegiatan seperti edukasi remaja oleh IDI serta peran aktif Posyandu menjadi sarana komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi penting mengenai pencegahan stunting. Selain itu, program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) juga mendorong perilaku hidup sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan.

Para pelaksana kebijakan penanggulangan stunting, terutama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, telah berkomunikasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang

berpartisipasi. Beberapa kegiatan multisektoral berikut digunakan untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kebijakan penanggulangan stunting:

1. Rapat Koordinasi Konvergensi Stunting Tingkat Kabupaten Sukabumi.
2. Pertemuan Konvergensi Intervensi Stunting Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sukabumi.
3. Workshop Penting untuk Pencegahan Stunting di Kabupaten Sukabumi

Dalam kerja sama lain di tingkat Kecamatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendidik remaja tentang cara mencegah stunting sejak usia dini. Pendidikan ini diberikan untuk membantu pemerintah daerah mengatasi stunting di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, intervensi pencegahan stunting juga dilakukan di Posyandu, lembaga kemasyarakatan di daerah. Posyandu menjadi pusat layanan dasar, terutama untuk memantau perkembangan bayi, balita, ibu hamil, dan calon pengantin. Kemudian ada program lain yang tidak dapat diabaikan, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat.

Sumber daya (resources)

Dari segi sumber daya manusia, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi memiliki tenaga medis dan non medis yang terlatih, termasuk dokter, bidan, perawat, dan kader kesehatan di tingkat Posyandu. Kader kesehatan ini sangat bertanggung jawab atas pengawasan kesehatan ibu hamil, anak balita, dan masalah gizi buruk. Kemampuan tenaga kerja ini terus ditingkatkan melalui pelatihan dan penyuluhan untuk staf posyandu, tenaga kesehatan, dan masyarakat tentang pentingnya gizi yang seimbang, pemberian ASI eksklusif, dan pengawasan perkembangan anak. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan individu untuk mendeteksi masalah gizi dan stunting sejak dini. Sumber daya anggaran dialokasikan untuk program penurunan stunting seperti pemberian makanan tambahan (PMT), suplemen gizi, dan program pengawasan dan pelatihan masyarakat.

Kabupaten Sukabumi memiliki tenaga kesehatan yang cukup, termasuk dokter, bidan, perawat, serta kader posyandu yang telah mendapatkan pelatihan. Mereka bertugas memantau dan memberi penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang, ASI

eksklusif, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Dana pemerintah dialokasikan untuk kegiatan seperti pemberian makanan tambahan, suplemen gizi, dan pelatihan masyarakat. Infrastruktur pendukung juga tersedia, seperti Puskesmas dan Posyandu, yang berperan besar dalam pelayanan kesehatan dasar, vaksinasi, serta pemantauan status gizi balita dan ibu hamil.

Selain sumber daya manusia dan anggaran, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas layanan kesehatan merupakan sumber daya tambahan yang tersedia. Pusat layanan kesehatan di Tingkat kecamatan adalah puskesmas, yang bertanggung jawab untuk memantau perkembangan balita, memberikan vaksinasi, dan memberikan perawatan medis dasar kepada ibu hamil dan anak. Posyandu adalah ujung tombak dalam pengawasan kesehatan anak di tingkat kelurahan, dan puskesmas juga berpartisipasi dalam kampanye pencegahan stunting dan pemantauan status gizi. Pemerintah daerah dapat memantau berat badan, tinggi badan, dan masalah gizi balita melalui Posyandu.

Disposisi (dispositions)

Disposisi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengurangan angka stunting merujuk pada sikap, kebijakan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi masalah stunting. Komitmen yang kuat terhadap penurunan angka stunting dengan menjadikannya prioritas dalam kebijakan pembangunan kesehatan adalah beberapa contoh disposisi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Salah satu bukti komitmen ini adalah dengan menyediakan anggaran yang cukup untuk program penurunan stunting, baik dari APBD Kabupaten Sukabumi maupun melalui keterlibatan dalam program nasional pemerintah pusat, termasuk Program Intervensi Serentak Pencegahan Stunting. Pemberdayaan kader kesehatan dan tokoh masyarakat memungkinkan Kabupaten Sukabumi untuk lebih menjangkau masyarakat di tingkat bawah dan memastikan bahwa program penurunan stunting diterima dengan baik.

Pemerintah bekerja sama dengan Posyandu dan tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi tentang pencegahan stunting dan memantau status gizi balita secara rutin. Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah aktif melakukan penyuluhan melalui berbagai media dan kegiatan. Ini termasuk penyuluhan di Posyandu, Puskesmas, dan

sekolah, serta kampanye media sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya stunting dan pentingnya gizi yang seimbang bagi ibu hamil dan balita. Selain itu, Pemerintah Kota Sukabumi berusaha untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi. Pemerintah daerah aktif mendukung pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, imunisasi, dan vitamin A. Selain itu, pemerintah daerah berusaha memastikan bahwa fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu, dan rumah sakit dapat memberikan layanan pencegahan dan pengobatan yang cukup.

Sikap dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukabumi terhadap program penurunan stunting sangat kuat. Hal ini ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang memadai dan dukungan terhadap program nasional seperti Intervensi Serentak Pencegahan Stunting. Pemerintah juga aktif memberdayakan kader kesehatan dan tokoh masyarakat agar dapat menjangkau warga secara langsung. Edukasi dilakukan secara rutin melalui berbagai media, baik offline (Posyandu, Puskesmas, sekolah) maupun online (media sosial), untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi. Selain itu, audit kasus stunting dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab dan memperbaiki strategi penanganan. Audit ini juga melibatkan Tim Pendamping Keluarga yang bertugas melakukan deteksi dini terhadap keluarga yang berisiko.

Tindak lanjut dari berbagai upaya tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024 melaksanakan audit kasus angka stunting yang dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya "Zero New Stunting". Audit kasus stunting ini merupakan implementasi Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Salah satu rencana AKS tersebut adalah pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS) guna mendukung target nasional penurunan prevalensi stunting dan mendukung terwujudnya "Zero New Stunting" di Jawa Barat. Program ini memaksimalkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam melakukan deteksi dini pada keluarga berisiko stunting. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Kabupaten Sukabumi masih berada pada angka 7,48% pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 8,98% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa tantangan pengurangan angka stunting masih signifikan (KDP Kab. Sukabumi, 2024).

Oleh karena itu, percepatan pengurangan angka stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua pihak melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan juga Masyarakat (Hasan, 2024).

Struktur Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Sukabumi membentuk struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara terorganisir. Bupati sebagai pimpinan daerah memegang peran strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Sekretariat Daerah (Setda) mendukung koordinasi antar instansi dan pengelolaan anggaran. Dinas Kesehatan menjadi pelaksana utama program, khususnya dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan, pemberian makanan tambahan, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Peran Bappeda penting dalam perencanaan program jangka panjang, sedangkan Dinas Sosial membantu keluarga berisiko melalui program bantuan seperti PKH. Lembaga yang dekat dengan masyarakat, seperti Posyandu dan kader kesehatan, menjadi ujung tombak dalam mendeteksi dan menangani kasus stunting secara langsung di lapangan.

Untuk melaksanakan kebijakan pengurangan angka prevalensi stunting, struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi terdiri dari berbagai lembaga dan instansi yang bekerja sama. Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah Kabupaten Sukabumi membagi tugas dan peran setiap sektor. Di posisinya sebagai kepala daerah, Bupati Sukabumi bertanggung jawab atas struktur birokrasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Sukabumi. Tentu saja, dia memegang peran strategis dalam menetapkan arah kebijakan dan memberikan arahan terkait pengurangan angka prevalensi stunting. Bupati Sukabumi bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasi seluruh kebijakan dan program pengurangan angka stunting, dan akan bertanggung jawab atas keputusan penting, alokasi anggaran, dan kebijakan terkait stunting. Selanjutnya, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi (Setda) membantu Bupati Sukabumi dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan program. Setda juga bertanggung jawab atas koordinasi antar SKPD, penyusunan anggaran, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, sektor utama dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan angka stunting di Kabupaten Sukabumi adalah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan juga menangani masalah gizi, pemantauan pertumbuhan anak, perawatan ibu hamil, dan layanan Posyandu dan Puskesmas. Program seperti pemberian makanan tambahan (PMT), imunisasi, dan ASI eksklusif juga termasuk dalam tanggung jawabnya. Selain Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga bertanggung jawab. Perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan adalah tugas Bappeda Kabupaten Sukabumi. Ini termasuk menyusun perencanaan anggaran dan program yang berkaitan dengan penurunan stunting. Kemudian, dinas sosial bertanggung jawab untuk membantu keluarga yang berisiko tinggi terhadap stunting, seperti keluarga miskin. Dinas sosial menjalankan program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), yang membantu ibu hamil dan balita mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan.

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan Kader Kesehatan adalah lembaga lain yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Posyandu, yang dikelola oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah, memainkan peran penting dalam penurunan stunting karena mereka memantau perkembangan balita, memberikan makanan tambahan, memberikan vaksin, dan mendidik orang tua. Selain itu, kader kesehatan yang terlatih di Posyandu sangat penting dalam mendeteksi masalah gizi dan kesehatan anak sejak dini.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan pengurangan angka stunting dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui komunikasi dan kolaborasi antar SKPD dan penggunaan elemen pentahelix. Dengan bekerja sama, banyak program inovasi telah dibuat untuk mengurangi tingkat stunting di Kabupaten Sukabumi. Selain komunikasi, ketersediaan sumber daya adalah faktor lain yang dapat membantu pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Sumber daya ini termasuk sumber daya manusia (tenaga kerja, dokter, bidan, perawat, dan kader kesehatan), sumber daya anggaran, dan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan. Selanjutnya, sikap Pemerintah Kabupaten Sukabumi terhadap pelaksanaan kebijakan penurunan stunting terdiri dari komitmen

yang kuat untuk mengatasi stunting melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Selain itu, struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang melibatkan berbagai SKPD dan lembaga yang bekerja sama juga mendukungnya. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengurangi prevalensi stunting, lembaga dari berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial, sangat penting. Kebijakan ini dilaksanakan secara efektif oleh pemimpin daerah, seperti Bupati, bersama dengan dinas terkait dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Kementrian PPN/Bappenas. (2018). *Pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/ kota Marienda*,
- Rachmawati (2024). *Implementasi Program Penurunan Stunting di Kota Sukabumi*. 10
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Third Edition. California: Sage Publications
- Wiguna, Meigawati,
- Amirulloh. (2022). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Sukabumi*. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*. Volume 6 Nomor 1